

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGAKA PEMIKIRAN**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Program Gerakan Serentak Membangun Kampung “GSMK”**

Menurut pedoman pelaksanaan program GSMK (2013), GSMK adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan hasilnya untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar mereka berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Program ini tercantum dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No.42 Tahun 2011 tentang pelaksanaan program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK)

Tujuan dari pemberian Program Geraka Serentak Membangun Kampung (GSMK) ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat kampung dalam pembangunan daerah, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan.
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
4. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan.

5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Kampung.
6. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Adapun sasaran lokasi dan lingkup kegiatan dari Program GSMK sebagai berikut.

a. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung adalah di wilayah Kampung/Kelurahan se-Kabupaten Tulang Bawang sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan Tingkat Kecamatan serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

b. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program Gerakan Serentak Membangun Kampung ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kampung yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan *Onderlagh*, pembangunan jembatan, pembangunan saluran Irigasi tersier.

Adapun prinsip dasar dari Program GSMK ini adalah :

1. Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat Kampung/Kelurahan itu sendiri.

2. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.
3. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat Kampung/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan.
4. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
5. Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
6. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan dana stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan kepada kampung sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan kecamatan serta rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana BLM Program GSMK Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
2. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif.
3. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Kampung/Kelurahan, merupakan kegiatan yang direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
4. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material (pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain lain.
5. Apabila terjadi sesuatu yang mengharuskan terjadinya perubahan jenis kegiatan yang telah ditetapkan, dibuat pernyataan dari masyarakat Kampung melalui Tim Kecamatan dengan syarat tidak menambah alokasi Dana BLM Program GSMK yang sudah ditetapkan. Program dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Pembina Kabupaten.

Adapun organisasi Pelaksana Program GSMK ini adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Kabupaten
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab Program GSMK.
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota para Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten.

- c. BPMPK/K sebagai Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Program GSMK dengan anggota Dinas/Instansi Teknis terkait.
- d. Tim Pengawas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

## 2. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan Program GSMK terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan dan seorang Kasi atau lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
- b. Menetapkan Fasilitator Kecamatan sebagai petugas teknis yang akan berada dibawah Koordinasi Konsultan Manajemen Pendamping.
- c. Melakukan sosialisasi Program GSMK Kepada Kelompok Masyarakat Kampung/Kelurahan.
- d. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Kampung/Kelurahan (POKMAS) di wilayah kecamatan atas usulan kepala kampung/kelurahan, berdasarkan hasil musyawarah kampung/kelurahan.
- e. Menyampaikan Usulan Program/Kegiatan Kampung/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Kecamatan.

- f. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan Program GSMK di Kecamatan.
  - g. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam Program GSMK.
  - h. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
  - i. Mengetahui dan menyetujui pengalokasian dan pencairan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung oleh POKMAS
  - j. Melakukan pengawasan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kabupaten secara periodik.
3. Tingkat kelurahan
- Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan Program GSMK adalah Kepala Kampung/Lurah. Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Membantu tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program GSMK yang disebut POKMAS, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.
  - b. Bersama dengan Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi Program GSMK kepada masyarakat Kampung/Kelurahan.
  - c. Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan POKMAS.

- d. Membantu POKMAS dalam menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
- e. Mengetahui dan menyetujui proposal kegiatan Program GSMK oleh POKMAS.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan

Tim Pelaksana Kegiatan Program GSMK adalah POKMAS, ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kampung/Lurah, berdasarkan hasil musyawarah Kampung/Kelurahan. Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Astek (Konsultan Manajemen Pendamping).
- c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan.
- d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat atau membuka Rekening POKMAS di Bank yang ditunjuk dengan spesimen Ketua POKMAS dan Bendahara POKMAS.

- f. Untuk pencairan Dana BLM dari rekening POKMAS, bendahara POKMAS harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke Camat/PJOK setelah disetujui baru ke bank untuk dicairkan.
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat.
- h. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
- i. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
- j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara periodik.
- k. Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksana Kegiatan Tingkat Kampung/ Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Pemeliharaan) sedangkan anggota POKMAS disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

## **2. Pengertian Peranan**

Roucek dan Warren (1984) mengemukakan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang dilakukannya individu pada saat berinteraksi berdasarkan pada pengalamannya terdahulu dan derajat persetujuannya terhadap apa yang dianggapnya sebagai jangkauan orang lain. Ciri yang ditunjukkan dengan nyata oleh individu dalam saling berinteraksi umum dalam situasi yang disebut peranan sosial.

Menurut Soekanto (1990), peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan mencakup tiga hal sebagai berikut.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu-individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut.

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya membutuhkan pengorbanan.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Peranan merupakan suatu konsep yang saling berkaitan, peranan seseorang ditentukan oleh status atau kedudukannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai peranan yang berbeda-beda.

Menurut Berry (1995) peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Selanjutnya ia juga mengemukakan tentang konsep harapan-harapan (role expectation) yang terangkum dalam dua macam harapan yaitu, (1) harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, (2) harapan dari pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya.

### **3. Partisipasi**

Menurut Madrie (1988) partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya keuntungan yang didapat dari hasil pembangunan itulah masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan, meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat mencakup lima hal, yaitu perencanaan, swadaya masyarakat, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Menurut Koentjarningrat (1974) tipe partisipasi ada 2 macam, yaitu partisipasi masyarakat sebagai aktivitas bersama dalam setiap program khusus, dan 2) partisipasi masyarakat sebagai individu di luar aktivitas bersama. Partisipasi masyarakat secara berkelompok termasuk di dalam pembangunan. Masyarakat secara berkelompok ikut serta dalam partisipasi menyumbangkan tenaga dan hartanya pada program-program pembangunan khususnya yang bersifat fisik. Jika masyarakat yakin program itu bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat tinggi dan spontan tanpa mengharapkan upah dari program. Sebaliknya bila ia dipaksa atau diperintah tanpa gambaran yang jelas mereka akan berpartisipasi dengan semangat yang rendah. Selain itu, partisipasi individu tidak saja bersifat fisik, tetapi dapat berupa menabung, membayar cicilan kredit, dan membeli sarana produksi atas dasar kemauan sendiri.

Menurut Mardikanto (1991) mengartikan partisipasi sebagai keikutsertaan seorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian partisipasi tersebut mendukung maksud bahwa keikutsertaan masyarakat atau petani dalam pembangunan pertanian karena adanya

kesadaran dari dalam diri individu bukan adanya paksaan dari pihak luar. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Ada dua makna partisipasi masyarakat sebagai berikut.

1. Partisipasi transformasional yaitu terjadi ketika partisipasi itu dipandang sebagai tujuan dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.
2. Partisipasi instrumental yaitu terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu.

#### **4. Pengertian Kelompok Masyarakat “POKMAS”**

Kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan mengadakan hubungan antara sesama mereka (Soekanto, 1990). Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong.

Salah satu ciri yang terpenting dari kelompok menurut Tomosoa (1978 dalam Mardikanto, 1991) adalah suatu kesatuan sosial yang memiliki kepentingan bersama dan tujuan bersama. Tujuan ini dicapai melalui pola inteteraksi yang mantap dan masing-masing (individu yang menjadi anggotanya) memiliki peranannya sendiri-sendiri. Kelompok dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari dua atau lebih individu (manusia) yang memiliki ciri-ciri :

- a. Memiliki ikatan yang nyata.

- b. Memiliki interaksi dan interrelasi sesama anggotanya.
- c. Memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas.
- d. Memiliki kaidah-kaidah atau norma tertentu yang disepekat bersama.
- e. Memiliki keinginan dan tujuan bersama.

Menurut pedoman pelaksanaan program GSMK (2013), kelompok masyarakat adalah kumpulan dari individu yang saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga terjadinya timbal balik dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program GSMK terdapat tentang POKMAS yang dimana merupakan penyelenggara program GSMK di tingkat kampung ditetapkan dengan surat keputusan camat atas usul kepala kampung berdasarkan hasil musyawarah kampung. POKMAS memiliki tugas seperti yang dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan Program GSMK dalam keputusan Bupati Tulang Bawang sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan
2. Menyusun proposal dan rencana teknik kegiatan
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis
4. Menyebarkan dan mensosialisasikan program
5. Menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
6. Menyiapkan rekening kolektif bersama kepala kampung

7. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan
8. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
9. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada camat secara periodik

Peranan Ketua POKMAS adalah sebagai koordinator kegiatan di lapangan yang bersama masyarakatnya memutuskan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sekretaris mencatat hasil-hasil rapat, membuat laporan dan administrasi lainnya, sedangkan Bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana, serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan kepada pemerintah dan penyandang dana lainnya. Tim pelaksana menyusun proposal, menyusun rencana anggaran biaya dan membuat rancang bangun, serta mengkoordinir seluruh kegiatan di lapangan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Wijaya (2011) dalam penelitiannya yang berjudul hubungan antara peranan peratin (kepala kampung) dengan tingkat kinerja kelompok masyarakat (POKMAS) dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat peratin dalam program GMBR.

2. Mengetahui tingkat kinerja POKMAS.
3. Mengetahui hubungan antara peranan peratin dengan tingkat kinerja POKMAS.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

1. Peranan peratin dalam program GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 80 persen. Hal ini karena sebagian besar peratin sudah melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Program GMBR. Peratin selalu melakukan sosialisasi program kepada seluruh lapisan masyarakat, memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan, membentuk POKMAS, menginventarisasi swadaya masyarakat, pendampingan POKMAS, memimpin forum musyawarah, memantau dan evaluasi serta pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari awal proses pembangunan hingga selesai program pembangunan.
2. Tingkat kinerja POKMAS dalam Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 70 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa POKMAS sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Program GMBR namun belum dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih dalam klasifikasi sedang, adapun beberapa bentuk kegiatan tersebut yaitu kegiatan penyusunan proposal rencan kegiatan, menginvenstarisasi potensi swadaya masyarakat, membimbing mengarahkan masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara peranan peratin/kepala pekon dengan tingkat kinerja POKMAS dalam Program GMBR ( $r_s=0,467$ ) yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung 3,384 lebih besar dari t-tabel pada  $\alpha = 0,05$  dan  $\alpha = 0,01$ , hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik peranan peratin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam program GMBR maka semakin tinggi tingkat kinerja POKMAS sebagai pelaksana kegiatan dalam Program GMBR.

Zenda (2011) dalam penelitiannya yang berjudul hubungan antara tingkat peranan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) dengan tingkat kinerja pengurus kelompok masyarakat (POKMAS) dalam program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat peranan Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat pekon (LPMP) dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).
2. Mengetahui tingkat kinerja Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung Barat.
3. Mengetahui hubungan tingkat peranan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon. (LPMP) dengan tingkat kinerja

Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Tingkat peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon dalam program GMBR di Kabupaten Lampung Barat, secara keseluruhan sudah baik dan dalam klasifikasi tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan LPMP melaksanakan peranannya secara baik. Tingkat peranan LPMP yang telah dilakukan membantu melakukan sosialisasi program, memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan. Bersama peratin, LHP, dan tokoh masyarakat secara musyawarah membentuk POKMAS, mendampingi POKMAS pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat, ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Tingkat kinerja POKMAS dalam program GMBR di Kabupaten Lampung Barat, secara keseluruhan sudah baik dan dalam klasifikasi tinggi. Tingkat kinerja POKMAS yang telah dilakukan yaitu terkoodinirnya kegiatan di lapangan, pelaporan mengenai dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksana dan teknis. Pembukuan tentang penerimaan dana dan penggunaan dana, pendataan potensi swadaya

masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan dan terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.

3. Terdapat Hubungan nyata antara tingkat peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) dengan tingkat kinerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam program GMBR. Semakin baik LPMP menjalankan peranannya maka semakin tinggi kinerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam program GMBR.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Pada era otonomi daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya. Selain itu daerah memberikan kewenangan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di daerahnya sesuai dengan potensi sumberdaya, kemampuan, dan keunikan yang ada pada setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang merancang suatu program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Program ini diberi nama Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK). Program GSMK adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Penyelenggara program GSMK dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (POKMAS). Salah satu aspek yang diperlukan dalam program GSMK adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut mendapat keuntungan dari proses dan hasil pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut pedoman pelaksanaan keberhasilan program GSMK tahun 2013 tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi peranan kelompok masyarakat sangat diperlukan agar dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program GSMK.

Berdasarkan uraian di atas maka variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah peranan POKMAS dalam program GSMK. Berberapa peranan yang harus dilakukan oleh POKMAS sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis program GSMK tahun 2013 sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Astek (Konsultan Manajemen Pendamping).

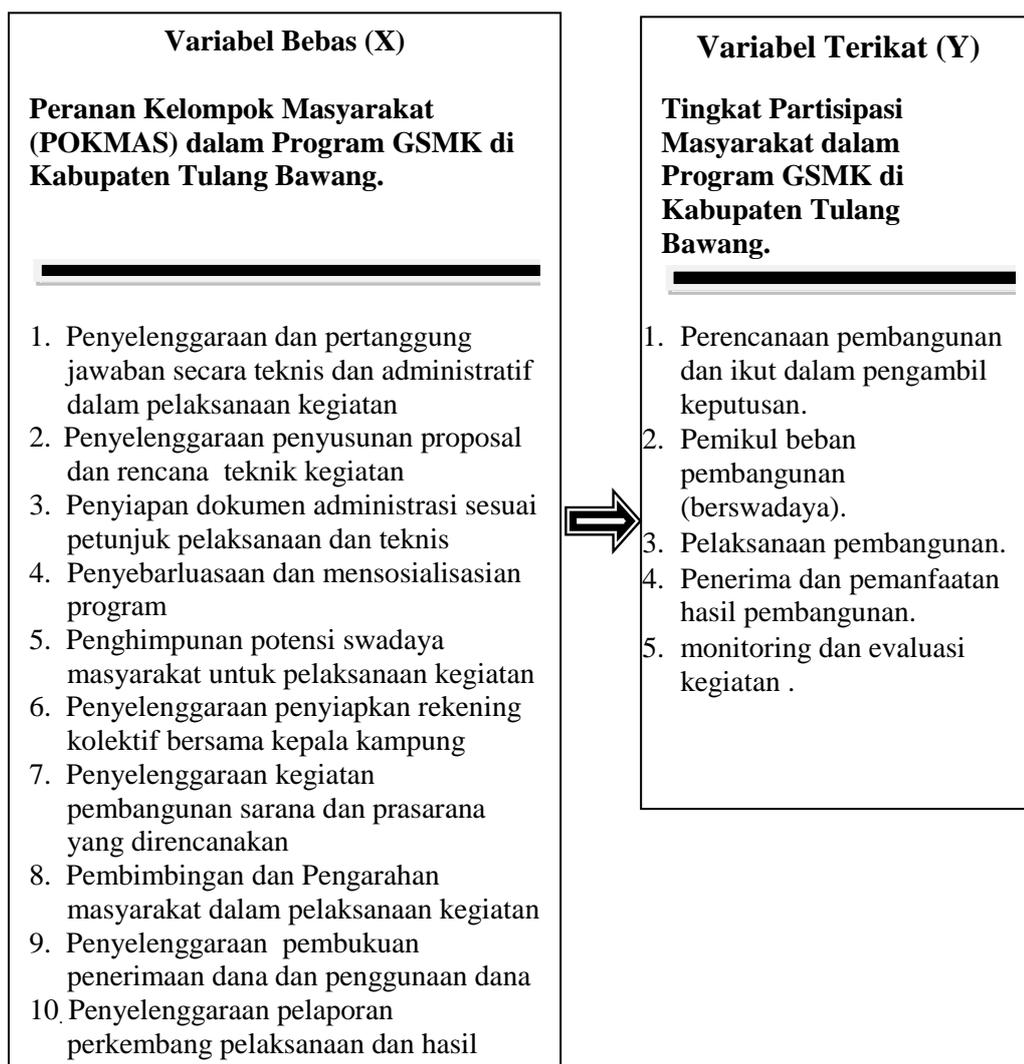
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis
4. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan program
5. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan rekening kolektif bersama kepala kampung
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat.
8. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara preodik.

Berdasarkan variabel terikat (Y) ini adalah tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Madrie (1998) partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pembangunan yang baik. Adanya keuntungan-keuntungan yang didapat dari hasil pembangunan itulah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program gerakan serentak membangun kampung memiliki lima indikator-indikator yaitu Perencanaan pembangunan dan ikut dalam pengambil keputusan, pemikul

beban pembangunan (berswadaya), pelaksanaan pembangunan, penerima dan pemanfaatan hasil pembangunan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Secara sistematis kerangka pemikiran hubungan antara peranan POKMAS dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program GSMK dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Paradigma hubungan peranan kelompok masyarakat (POKMAS) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang nyata antara peranan POKMAS dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang.